BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa (pendidikan) dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan bisa membantu manusia mengangkat harkat dan martabatnya dibandingkan manusia lainnya yang tidak berpendidikan. Pendidikan adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani anak didik menuju terbentuk kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu.[1]

Menurut hukum pendidikan nasional administrasi dan manajemen pendidikan nasional tahun 1999 bab 5 pasal 1 ayat 31 bahwa "Kementerian memiliki wewenang untuk mempromosikan dan mengawasi pendidikan di semua tingkatan dan di semua kategori, mendefinisikan kebijakan, rencana, dan standar pendidikan Mendukung sumber daya untuk pendidikan, promosi dan koordinasi agama, seni, budaya dan olahraga untuk pendidikan. Termasuk pemantauan dan mengevaluasi manajemen pendidikan dan lembaga pemerintah lainnya seperti

[1]Kompri, *Manajemen pendidikan Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017), h. 15.

yang dipersyaratkan oleh hukum untuk menjadi wewenang kementerian atau lembaga pemerintah di bawah Kementerian"[2]

Lembaga pendidikan Agama Islam di Thailand yaitu pendidikan madrasah yang menggabungkan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Madrasah ini pada mulanya adalah lembaga pendidikan pondok yang berubah menjadi sistem Madrasah dilembaga ini pengaturan sesi pelajaran agamanya pada pagi hari dan pelajaran umumnya pada sore hari. Kurikulum pelajaran umumnya diambil dari kurikulum pemerintah. Adapun tingkat pendidikan, meliputi:

1. Tingkatan Ibtidaiyah.(Ibtidaiyah)
2. Tingkat Mutawassithah. (Tsanawiyah)
3. Tingkat Tsanawiyah.[3](Aliyah)

Di dalam dunia pendidikan salah satu hal yang sangat penting yaitu kebijakan pendidikan. Sering dikatakan kebijakan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka menwujudkan

[2]Phra'rāch ban yat kān seksā heng chāt ph.Ṣ. 2542 Kae khai phem tem (c̄habạb thī 2) ph.Ṣ. 2545 Læ' (chabab thī 3) ph.Ṣ., *Kan Berihan Lea' Kan Chad Kan,* 2553, Nā.11.

[3]Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Masyarakat Patani,* (LP3ES: Jakarta: 1989), h. 140.

tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.[4]

Tentu saja terhadap aneka persoalan pendidikan yang kompleks dan rumit, kebijakan pendidikan berhadir dan berusaha memberikan solusi implementasi yang efektif. Namun demikian, dari keseluruhan kebijakan pendidikan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah dengan segenap peranti birokrasi yang dimilikinya di atas pada kenyataan belum membuahkan hasil optimal.[5] Ada juga ayat suci yang berkaitan dengan kebijakan atau ambil keputusan sesuatu yang berfirman Allah SWT: Q.S: An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا– ٤:٥٨

Pendidikan Islam yaitu suatu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik kearah terbentuknya pribadi muslim yang baik. Karena ia merupakan sebagai alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial) kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dalam hal ini, maka kedayagunaan pendidikan sebagai alat pembayaran sangat bergantung pada pemegang alat kunci yang banyak menentukan keberhasilan

[4]Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, Aplikasi, dan kondisi Objektif Pendidikan di Indoneesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 41.

[5]Arif Rohman & Teguh Wiyono, *Education Policy in decentralization Era*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h. 5-15.

proses pendidikan, yang telah perkembang di berbagai daerah dari system yang paling sederhana menuju system pendidikan Islam yang modern.[6]

Tujuan pendidikan sekolah agama menurut Kantor Pendidikan Swasta Departemen Pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan di Thailand untuk meneguhkan keimanan kepada Allah SWT., serta menjauhi larangannya, menumbuhkan akhlak yang luhur, mewujudkan lingkungan sosial yang baik, memiliki ilmu pengetahuan, khususnya dalam kematangan intelektual, mampu berdikari dalam segala aspek, khususnya dalam mencari nafkah untuk kehidupan sendiri keluarga, bersedia meningkat sifat tanggung jawab terhadap agama peribadi, masyarakat, negara dan seluruh umat manusia.[7]

Proses pendidikan Islam telah berlangsung sepanjang dan berkembang sejalan dengan berkembang Islam dan budaya di permuka bumi. Mayoritas umat Islam di Thailand tinggal di wilayah selatan Thailand, yaitu daerah yang disebut dengan Patani, daerah ini meliputi provinsi Yala, Narathiwat, Patani, Setul dan sebagian Songgkla, dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa yakni 8 % dari jumlah penduduk Thailand yang berjumlah 65 juta jiwa. Di wilayah ini dihuni oleh sekitar 85 % masyarakat Muslim.[8]

Setiap kebijakan pasti mempunyai tujuan dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian bagiannya diarahkan dari tercapainya tujuan tersebut, maka dalam kebijakan pengembangan Pendidikan Islam di Patani Thailand

---

[6]Fatah Syukur , *Sejarah Pendidikan Islam,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 2.

[7]Surin Pisuwan, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Masyarakat Patani*…, h. 140.

[8]Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), h. 131.

melaksanakan pendidikan secara totalitas yang dapat mengantarkan peserta didik tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang Islam dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dalam kebijakan pengembangan Pendidikan Islam tidak dapat lepas dari refleksi kehidupan bangsa dan negara itu sendiri. Proses pendidikan Islam sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam dan budaya dipermukaan bumi.

Pendidikan Islam yang dilaksanakan di Patani merupakan pendidikan taman didik kanak-kanak atau sering dikatakan Sekolah TADIKA (Taman Didikan Kanak-kanak), pendidikan Pondok, dan pendidikan sekolah swasta. Namun, ada perbedaan dari system pembelajaran dan dari segi kebijakan pendidikan masing-masing. Pendidikan Sekolah TADIKA (Taman Didikan Kanak-Kanak) dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Ahad, selain dari ini yaitu pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk pendidikan dasar. Pendidikan Pondok merupakan pendidikan tradisional bagi masyarakat muslim Patani baik pemuda dan orang dewasa bisa melaksanakan pembalajaran di pondok tersebut dalam kaitan dengan strategi nasional secara keseluruhan, pemerintah pusat melancarkan program perbaikan pendidikan pondok dalam tahun 1961, dengan tujuan untuk mengubah lembaga tersebut menjadi pelopor dan modernisasi atau mengubah pondok menjadi sekolah swasta dengan kurikulum sekuler. Kementerian pendidikan diberi tugas untuk mendaftar semua pondok yang ada guna menentukan pondok mana yang “memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan pemerintah”. Sebelum inisiatif tahun 1961 itu, Kementerian

Pendidikan tidak mempunyai wewenang yang tugas berdasarkan hukum untuk mengatur pondok. Selama itu pondok lebih di anggap sebagai "lembaga keagamaan" daripada "lembaga pendidikan"[9]

Soal yang paling peka dan kontroversial adalah kurikulum mengenai etika dan moralitas yang diambil langsung dari kerikulum umum untuk seluruh negeri. Kurikulum itu dengan sendiri didasarkan atas agama Buddha dan bukan agama Islam. Ia dianggap sebagai bagian dari pendidikan sekuler yang diharuskan bagi pondok. Bagi kaum birokrat Buddhis, apabila tugas mereka adalah untuk menciptakan identitas nasional Thailand di kalangan orang-orang Melayu-Muslim di Thailand Selatan, maka Buddhisme harus merupakan bagian integral dari identitas itu.[10]

Dengan adanya kebijakan pendidikan agama Islam, tugas pemerintah Thailand dan kementerian pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam sampai saat ini. Pemerintah dan kementerian pendidikan yang berwewenangan dalam melaksakan segala pengelola penedidikan Islam di Patani, baik dari tingkat dasar maupun tingkat menengah. Harapannya siswa dari semua lembaga pendidikan dapat mensinergikan dan menginterkoneksikan antara agama dan bagian umumnya dengan dasar agama terlebih dahulu, antara yang didapat diawal pembelajaran dan diakhir pembelajaran.

Pendidikan adalah jantung bangsa. Adalah menciptakan dan mengembangkan orang untuk masa depan negara ini merupakan faktor penting

---

[9]Surin Pisuwan, *Islam di Muangthai : Nasionalisme Masyarakat Patani*…,h. 144-145.

[10]*Ibid.,* h. 148.

yang harus didorong untuk mencapai visi "Thailand stabil, sejahtera, berkelanjutan." Secara keseluruhan, pendidikan Thailand saat ini masih sangat bermasalah terutama cerminan kualitas anak-anak Thailand merupakan kebutuhan mendesak untuk memiliki reformasi pendidikan untuk mengembangkan orang secara berkelanjutan, perdana menteri (Jenderal Prayuth Chan-ocha) memberi arti penting bagi pendidikan masalah yang diangkat pendidikan terkait dengan perkembangan negara di berbagai bidang.

Kebijakan pendidikan yang telah menghubungkan dan mempengaruhi kebaikan perkembangan nagara yang mengarah pada pengembangan pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan, yaitu, ada tiga: 1) Kurikulum 2) Pengembangan Bahasa Thai 3) Pengembangkan guru dan tenaga kependidikan.

Untuk memasukkannya ke dalam praktek untuk mendorong reformasi sistem pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai visi negara. “reformasi pendidikan untuk masa depan nagara Thailand stabil, sejahtera, berkelanjutan” dengan kata bahasa Thailand yaitu “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Mankhong, Mangkhang, Yangyein). Memvisualisasikan masalah dan menawarkan solusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan, Thailand akan terus mengumpulkan dan menganalisis, mensintesis informasi untuk mencerminkan pandangan dari perdana menteri pada reformasi kebijakan untuk mengamankan kesejahteraan yang berkelanjutan masa depan untuk digunakan dalam perencanaan dan arah reformasi pendidikan di Thailand, sekarang dan masa depan. Kebijakan pendidikan yang

telah menghubungkan dan mempengaruhi kebaikan perkembangan nagara yang mengarah pada pengembangan pendidikan umum dan pendidikan Islam.

Berdasarkan lantar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan (Analisis masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'Ocha 2016-2019)"**

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah dikemukan peneliti diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Bagaimana Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam di Patani masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha ?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk memudahkan mendapatkan data yang ada hubungannya dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui Kebijakan Pendidikan Islam di Patani masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha.

Signifikasi penlitian ini dapat dilihat dua sisi, yaitu:

1. Signifikasi secara teoritis
   a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian dan pengembangan teori tentang pendidikan Islam Patani Thailad.

b. Sebagai khazanah tambahan keilmuan di bidang penidikan agama Islam, khususnya tentang pendidikan Islam Patani Thailand.

c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber pengetahuan bagi yang berminat di bidang ini.

2. Signifikasi secara praktis

a. Bagi pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, khususnya kebijakan dalam lembaga pendidikan Islam agar tidak salah arah dan semaunya sendiri yang itu berdampak pada instabilitas sistem pendidikan.

b. Kemudian bagi praktisi pendidikan agar bisa memahami bahwa pada saat orde baru pendidikan pluralisme ini diperjuangkan dan diformulasikan dengan susah payah, sehingga ketika menjalankan tugasnya tidak terkesan semula.

c. Bagi masyarakat secara umum agar memahami dan mempelajari betul kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan sehingga bisa mengontrol ketentuan yang ditelurkan oleh pemerintah.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul penelitian skripsi diatas, maka kiranya perlu penulis jelaskan terlebih dahulu apa maksud yang terdapat dalam judul tersebut :

1. Kebijakan

Kata *"kebijakan"* merupakan terjemahan dari kata *"policy"* dalam bahasa inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Secara umum *"kebijakan"* dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.[11]

2. Pengembangan Pendidikan Islam

Pengembangan adalah suatu proses kerja cermat dalam merubah sesuatu keadaan menjadi lebih baik dan lebih luas pengaruhnya dari sebelumnya.[12] Adapun yang dimaksud pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang mengarahkan anak didiknya kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi muslim yang baik.[13]Jadi disimpulkan adalah suatu cara untuk mengembangkan pendidikan Islam dengan sesuatu teori yang membuat lebih baik, pada pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan (Analisis masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha 2016-2019).

E. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sabagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan

---

[11]Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan…,* h. 37-38.

[12]A. Rifqi Amin, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam Reinterpretasi berbasis Interdisipliner,* (Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 4.

[13]Fatah Syukur , *Sejarah Pendidikan Islam…,* h. 3.

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-uku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Tohiroh Saaah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 dengan judul "Pendidikan Islam di Patani Selatan Thailand dalam perspektif historis".
2. Tesis Abdulloh Mad-adam, mahasiswa magister pendidikan administrasi dan manajemen pendidikan islam Universitas Prince of Songkla tahun 2015 dengan judul "Manajemen Pendidikan Islam di Pulau Satun Bulone Provinsi".
3. Ismail Suardi Wekke, Siddin, Sukree Langputeh (2019) dalam jurnal Internasional Berjudul "Islamic Education in Thailand Pattani Muslim Minority: What are the Institutional Continuity and Change?"
4. Abdulroman Mahir, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, Candra Wijaya (2019) dalam jurnal Antropologi Sosial Budaya berjudul "Analisis Kebijakan Kurikulum di Tsanawi Muassasah Assaqofatul Islamiyah Pondok Pombing di Pattani, Selatan Thailand"

F. Kajian Teori

1. Kebijakan pendidikan

   a. Pengertian Kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan nagara

dan pembangunan bangsa di bidang pendidikan yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan, atau diprivatisasikan kepada organisasi di luar pemerintahan. Oleh kerana itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah merupakan kebijakan yang bersifat cerdas, dalam arti kebijakan pendidikan tersebut harus mampu memecahkan problem pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada public, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun akuntabilitasnya.

Disamping itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan yang baru lebih besar dan lebih rumit dibandingkan problem pendidikan yang hendak diatasi atau dipecahkan. kebijakan pendidikan yang dirumuskan juga hendaknya memberikan harapan baru bagi warga nagara bahwa mereka dapat menjalani hari esok yang jauh lebih baik setelah kebijakan pendidikan itu diimplementasikan. Serta, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efesien. [14]

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku Administrasi Pendidikan Kontemporer karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya

[14]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan…,* h. 64.

sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.[15]

Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para:

1) Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.[16]
2) Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai sutau strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang

[15]Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 97.

[16]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan*…, h. 38.

menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.[17]

3) Pendapat Koontz dan O"Donell dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.[18]

Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.

b. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Proses analisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan.

Analisis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk gambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku

---

[17]Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 3.

[18]Syaiful Syagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*…, h. 97.

kebijakan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakannya. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, dikaji sampai pada ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan hambatan, halangan, gangguan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud. Analisis selanjutnya diarahkan pada kajian implikasi-implikasi keilmuan untuk membangun paradigma baru dalam konsep dan teori kebijakan pendidikan. Pada tahapan ini, kebijakan dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep dalam rangka profesionalisasi manajemen pendidikan.

Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen-komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi krisis multidimensional. Jika berangkat dari filosofi demokratisasi, pelayanan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang diwujudkan dalam misi dan tugas lembaga pendidikan, diperlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut merupakan standar, spesifikasi dan model normatif ini, dipakai untuk menseleksi bahan masukan untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran sebagaimana keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan bangsa.[19]

c. Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai

[19]Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan :Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 51-52.

kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihakpihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.[20]

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Syaiful Syagala mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Pendidikan Kontemporer" bahwa secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:[21]

1) Pendekatan Empirik *(Empirical Approach)*

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisa kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

2) Pendekatan Evaluatif *(Evaluatif Approach)*

Evaluasi menurut Imron adalah "salah satu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan

[20]Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*…, h. 63.

[21]Syaiful Syagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*…, h. 99-101.

ataukah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak". Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif.

Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan. Evaluasi kebijakan organisasi merupakan aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai yang direncanakan.

Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung sama lainnya diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis.[22]

Tata urutan dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan sebagaimana tampak pada skema sebagai berikut:[23]

---

[22]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan*…, h. 63.

[23]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan*…, h. 101.

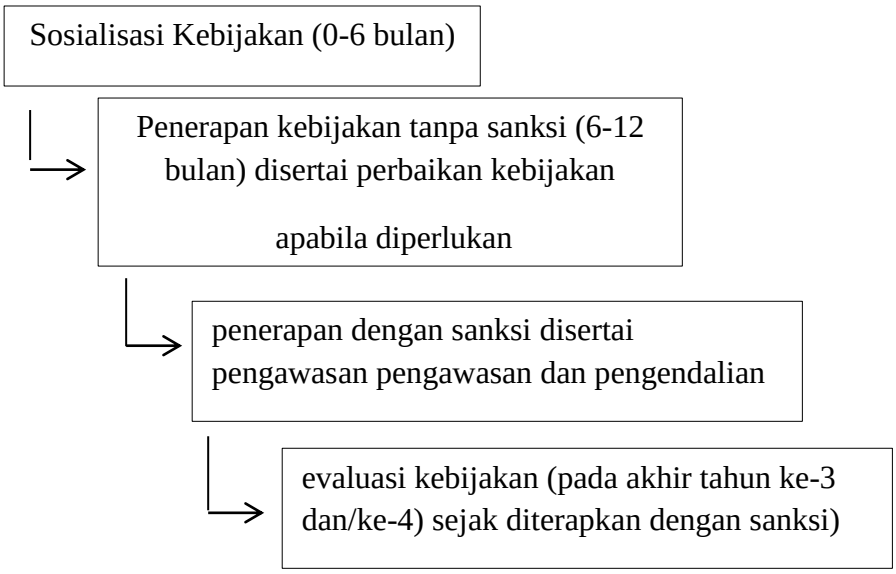

a) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0- 6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijaksanaan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media saat pertemuan langsung dengan masyarakat.

b) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selam 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.

c) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian.

d) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilakukanlah evaluasi kebijakan pendidikan.

d. Monitoring & Evaluasi kebijakan

Kebijakan yang sudah dirumuskan tentunya akan melewati tahap implementasi. Agar sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan maka perlu adanya monitoring serta evaluasi dari kebijakan yang sudah diambil. Proses monitoring merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan memberikan informasi nyata terkait realitas lapangan.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Menurut Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah dalam buku Kebijakan Pendidikan, monitoring berfungsi sebagai berikut:

1) Ketaatan *(compliance)*

   Menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

2) Pemeriksaan *(auditing)*

   Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran atau belum.

3) Laporan *(accaounting)*

Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu.

4) Penjelasan *(explanation)*

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan.[24]

e. Kendala dalam implemtasi kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan dalam tatanan kebijakan. Karena implementasi kebijakan merupakan proses yang sifatnya sangat penting. Dapat diibaratkan implementasi kebijakan adalah penentu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Namun proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan.

Menurut Pieters sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah bahwa sangat diperlukan instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1) Hukum

Instrumen yang paling umum digunakan pemerintah, karana hanya pemerintah yang berwenang menetapkan hukum. Dengan menetapkan suatu hukum, pemerintah mempunyai ligitimasi untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan yang dapat memaksa setiap warga

[24]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan*…, h. 110-112

Negara untuk mentaatinya. Sebagai instrument kebijakan, hukum mempunyai kegunaan untuk mengatur kedudukan warga negara/ sekolah dan hukum merupakan alat pengatur kehidupan warga negara/ sekolah.

2) Services

Dalam implementasi kebijakan, pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan pelayanan kepada warga Negara. Pemberian pelayanan dapat meliputi berbagai bidang termasuk pelayanan pendidikan.

3) Dana

Ketersediaan dana merupakan instrumen sangat penting, sebab pemberian pelayanan kepada masyarakat dan jalannya organisasi pemerintah hanya mungkin dilakukan apabila tersedia sumber daya untuk mempunyai semua kegiatan pemerintah.

4) Situasi

Apabila semua instrumen di atas gagal digunakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kedudukan pemerintah dan lembaga politik lain, sepanjang mereka masih memiliki legitimasi masyarakat, mereka mempunyai posisi yang menguntungkan untuk menumbuhkan keyakinan dalam mempengaruhi masyarakat, sebab

mereka memiliki akses untuk berbicara atas nama kepentingan umum.[25]

2. Pendidikan Islam

a. Pengertian pendidikan Islam

Secara unum, Pendidikan Islam yaitu pengaturan diri individu dan masyarakat yang disiapkan kepada menetapi Islam dan mempraktikkannya secara keseluruhan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Menurut rumusan hasil Konperensi Pendidikan Islam Dunia Ke 1 di King Abdul ‘Aziz University Jeddah, tahun 1977, sebagaimana telah diutarakan pada Bab II, dinyatakan:

The mearing of education in it totality in the context of Islam is inherent in the connotations of the term Tarbiyyah, Talim and Ta"dib taken together. What of this terms conveys concerning man and his society and environment in relation to God is related to the others, and together they represent the scope of education in Islam, both formal and 'nonformal[26]

Pengertian pendidikan secara keseluruhan dalam konteks Islam semakna dengan istilah tarbiyah, ta'lim dan ta'dib yang dipakai kesemuanya. Istilah tersebut mengarahkan sesuatu pada manusia dan masyarakatnya, juga lingkungan dalanm kaitan dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran, dihubungkan dengan yang lainnya, dan kesemuanya menghadirkan lingkungan pendidikan Islam baik formal maupun non formal.

Pendidikan Islam Merupakan upaya mengembangkan seluruh potensi individual dan sosial manusia berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan merupakan

---

[25]Hasbullah, *Kebijkan Pendidikan*…, h. 107-108.

[26] Kamrani Buseri, *Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 72.*

usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk mengembangkan seluruh potensinya, sehingga tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya kepribadian Muslim.[27]

Menurut Ahmad tafsir (2004:24) bahwa secara sederhana pendidikan Islam adalah pendidikan yang "berwarna" Islam. Maka pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berdasar Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.[28]

b. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Al-Ghazali dalam Fathiyah Hasan Sulaiman (1986:24), tujuan pendidikan harus tercermin dari dua segi, yaitu: (1) insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarruban ila Allah*): dan (2) insan purma yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Ibnu Khaldun merumuskan tujuan pendidikan dengan berpijak pada firman Allah berikut: QS. al-Qashshas:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ

Dari firman Allah tersebut, Ibnu Khaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan terbagi atas dua macam yaitu; (1) tujuan yang berorientasi ukhrawi, yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah (*'abdullah*); (2) tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang

[27]Uci Sanusi, Rudi Ahmad Suryadi, M. Ag, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 10.

[28]Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian teoritis dan pemikiran Tokoh*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2014), h. 1

mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain (Zayadi, 2006:57).

Pada hakikatnya tujuan pendidikan terfokus pada tiga bagian. *Pertama*, terbetuknya *insan al-kamil* (manusia paripurna) yang memiliki akhlak *qurani. Kedua*, terciptanya insan yang *kaffah* dalam dimensi agama, budaya, dan ilmu. *Ketiga*, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba Allah *('abdullah*) dan wakil Tuhan di muka bumi *(Khalifah fil ardh).*

c. Urgensi Pelaksanaan Pendidikan Islam

Pelaksanaan pendidikan Islam menempati posisi yang sangat urgen dan strategis dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Mengapa demikian? Karena pendidikan Islam akan membimbing manusia dengan bimbingan wahyu Ilahi, hingga terbentuknya individu-individu yang memiliki kepribadian yang Islami. Pendidikan Islam memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat fisik (*jasmaniah*) maupun nonfisik *(rohaniah),* yang profilnya digambarkan Allah dalam al-Ouran sebagai sosok *ulil albab*, sebagai manusia muslim paripurna, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan selalu produktif mengerjakan amal saleh sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalamal-Ouran: *"Sesungghnrya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan buwni (seraya berkata): "Ya Tuhan*

kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka perilharalah kami dari siksa neraka" (QA. Al-Imran: 190-191)

Berdasarkan pada teks ayat di atas nampak jelas sasaran dan tujuan perdilkon Islam, yaitu menjadikan manusia yang *ulil albab,* yakni manusia yang berzikir dan sekaligs berpikir, pikir dan berzikir, disertai dengan sifat produktif dalam mengejarkan amal saleh di manapun ia berada, berdoa dan tawadhu terhadap Allah , sehingga tidak ada rasa sembong dan pembangkangan yang berarti. Lebih lagi insan *ulil albab* ini menggambarkan sosok manusia yang kompeten, yaitu seorang yang beriman (zikir/afektin), berilmu (piker/kogitif), dan memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan (amal/pikomotorik). Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi dan berperan dalam membangun manusia yang beriman, berilmu dan sekaligus menghiasi dirinya dengan akhlak mulia.

Penanaman ajaran Islam harus diberikan sejak dini, mulai dari usia kanak-kanak, remaja, bahkan sampai dewasa. Dalam Islam dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang hayat *(long life cation)* Artinya selama ia hidup tidak akan lepas dari pendidikan, karena setiap langkah hidup manusia hakikatnya adalah belajar, baik langsung maupun tidak langsung.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikarn agama Islam mutlak harus diberikan, karena pada jenjang itulah terjadi pembentukan kepribadian, pembiasaan untuk menguasai konsep-konsep Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Pada anak usia dini, Islam harus dijadikan landasan bagi pembelajaran, hingga generasi ke depan benar-benar menjadi generasi Islam yang berkualitas. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

harus terhapuskan kesan ajaran Islam eksklusif, kejam, dan kesan-kesan negatif lainnya. Hal tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan berbagai friksi dan aliansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti sekarang ini muncul berbagai aliran-aliran sesat dan menyesatkan yang menimbulkan friksi, yang mengguncang keutuhan Islam sebagai agama yang sempuma. Berkaitan dengan hal itu, peran dan fungsi pendidikan Islam dalam membangun manusia sangatlah penting keberadasannya, karena melalui pendidikan Islam inilah diharapkan muncul generasi muda Islam yang *kaffah.*

Selanjutnya, Konsep-konsep pendidikan Islam juga merupakan pembeda dalam menacari konsep pendidikan yang dapat mengembangan SDM yang kompeten dan berakhlak. Konsep-konsep pendidikan umum dan pendidikan Islam sama-sama terikat oleh nilai-nilai universal sebagai ikatan nilai Ilahi yang bersifat mutlak, demikian juga Pendidikan Agama Islam (PAD. Dengan demikian, nilai-nilai yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan umum tidak hanya berdasarkan baik dan buruk menurut manusia, tapi baik dan buruk itu harus mencapai standar ukuran nilai-nilai ketuhanan yang digariskan oleh Tuhan semesta alam, yaitu nilai-nilai spiritual yang digariskan oleh al. Quran dan al-Hadits.

Oleh karena itu, apabila pada saat ini penyelenggaraan pendidikan umum tidak dilaksanakan dengan berdasarkan pada konsep-konsep pendidikan Islam seperti yang digunakan oleh PAI berarti salah konsep. Konsep-konsep dasar PAI merupakan pembeda (*a-furqan*) antara konsep yang benar dengan yang salah.

Konsep- konsep dasar pendidikan yang digunakan dalam PAI, dapat dijadikan acuan dalam orientasi, pendekatan, metoda, dan strategi, karena yang dituju dalam pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan tapi bagaimana membangun pribadi manusia yang memancarkan cahaya imani yang diwujudkan dalam amal yang ilmiah berakhlakul karimah dan menyebarkan rahmatan lil'alamin. Profil lulusan unggul atau sosok manusia yang diunggulkan dapat dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran bahwa: *"Allah akan meningkatkan di antara orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang burilnu beberapa derajat"* (OS. al-Mujadalah:11).

Dari surat tersebut dapat ditafsirkan bahwa orang yang diunggulkan Allah SWT adalah seorang mukmin yang berilmu, sehingga semua amal salehnya didasarkan atas ilmu yang dimilikinya. Oleh karana itu, ada kata-kata bijaksana "amal yang ilmiah atau ilmu amaliah". Seorang mukmin yang berilmu juga di digambarkan Allah SWT sebagai sosok *ulil albab* (QS. Ali Imran: 190) yang profilnya dirumuskan dalam al-Quran, yaitu *"orang yang Selal Allah baik dalan keadaan berdiri, duduk ataupun (beiman), menafakuri penciptaan langit dan bumi (sehingga memperoleh ilmu pengetahuan), seraya berkata: "Ya Robbana tiada Engkau ciptakanini dengan sia-sia (maka ia akan memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan), Maha Suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari azab neraka (dengan tetap berpegang pada 'tali Allah')" (OS. Ali Imran:191).*

Dengan demikian, lulusan yang bermutu tinggi adalah seorang mukmin yang memiliki ilmu (kognitif/knowledge), dan mampu memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan, sebagai amalnya (motorik/ skill) dengan akhlak mulia (nilai dan

sikap/attitude), sehingga berdampak rahmatan lil alamin. Lulusan bermutu yang memiliki pribadi yang integral, yaitu integrasi antara iman, ilmu, dan amal.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bagaimana al-Quran mendorong manusia untuk membangun pendidikan Islam bermutu, sehingga lahir sumber daya yang kompeten dan berakhlak mulia. Hal tersebut menunjukkan adanya *furqan* (pembeda) bagi penyelenggaraan dengan yang salah (Team Ness, 2008:6-11).[29]

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang data-datanya digali dari data-data kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena bukan kuantitas yang akan dilihat, tetapi sejarah dan pikiran seseorang. Sehingga penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif; yang memfokuskan pada kebijakan masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha (2016-2019) tentang kebijakan pengembangan pendidikan islam di Patani Thailand Selatan. Oleh karena sifat penelitian ini kualitatif, maka kebenarannya bersifat subjektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejerah, Pendekatan historis atau yang juga dikenal dengan historik adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk

[29]Kamrani Buseri, *Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan Islam* …, h. 10-19

memahami kenyataan-kenyataan sejarah, malahan yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.[30]

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan pengembangan pendidikan islam di Patani Thailand Selatan (Analisis masa pemerintah perdana menteri Pra'yut Chan'ocha 2016-2019).

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya UU pemerintah, buku-buku atau ebook yang berkaitan secara langsung, tesis, ejurnal, artikel, dokumen, serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpul adalah data dari semua yang dicetak oleh pemerintah atau yang diakses oleh kementrian pendidikan dan pusat penelitian contohnya UU pemerintah, buku-buku atau ebook yang berkaitan secara langsung, tesis, ejournal, artikel, dukomen serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul

[30]Wildan Rusli, "Pemikiran H.O.S Cokroaminoto (1882-1934) Tentang Moeslim National Onderwijs Dan Implikasinya Dalam Manajemen Pendidikan Islam", *Tesis*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015, h. 109-110.

dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalanpenggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan kedalam matriks selanjutnya di buat daftar cek.[31]

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan dan signifikasi penelitian
4. Definisi Operasional
5. Penelitian kepustakan
6. Kajian teori
7. Metode penelitian
8. Sistematika penelitian

[31] Arip Rohman, "Pengelolaan Sekolah Berbasis Religi Studi Situs Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen Demak", *Tesis* Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, h. 46.